

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi sosial. Melalui proses pendidikan ini, masyarakat dibekali kesadaran akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, serta sikap positif yang mendukung keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Peran ini terlihat dalam peningkatan kesadaran, pengembangan keterampilan sosial, pembentukan sikap demokratis, fasilitasi dialog publik, dan akses terhadap informasi yang relevan.

Namun, efektivitas pemberdayaan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep PKn, ketimpangan partisipasi antar kelompok usia dan pendidikan, penggunaan istilah yang tidak kontekstual, kurangnya fasilitator yang kompeten, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berbasis budaya lokal.

Sebagai solusi, berbagai upaya perlu dilakukan, seperti pengembangan kurikulum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, penerapan metode pembelajaran partisipatif, penanaman nilai-nilai kebangsaan secara konsisten, peningkatan literasi digital, pelibatan komunitas eksternal, serta pembentukan agen perubahan sosial. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan semua pihak, pendidikan kewarganegaraan akan menjadi wahana transformasional yang mampu menciptakan masyarakat yang sadar, aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk merancang program pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Dukungan anggaran dan penyediaan fasilitas pelatihan juga harus menjadi prioritas agar program dapat berjalan efektif dan merata.

2. Bagi Fasilitator atau Pengajar. Fasilitator perlu dilatih untuk menggunakan pendekatan berbasis partisipasi dan budaya lokal agar materi lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana, metode diskusi interaktif, dan studi kasus lokal dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga secara lebih luas.
3. Bagi Masyarakat Umum. Masyarakat diharapkan mulai melihat pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai pelajaran sekolah, tetapi sebagai bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi dalam forum warga, kegiatan sosial, dan musyawarah desa harus terus didorong sebagai bentuk nyata keterlibatan warga negara.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek-aspek tertentu, seperti efektivitas metode pengajaran kewarganegaraan berbasis budaya lokal, pengaruh media digital terhadap kesadaran sosial, atau studi perbandingan antar desa untuk mengetahui pola pemberdayaan yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi sosial.